

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah kemerdekaan Indonesia Mohammad Hatta menawarkan konsep politik luar negeri bebas aktif dalam pidatonya yang berjudul “Mendayung diantara Dua Karang” yang disampaikan pada tanggal 2 September 1948 di depan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Indonesia menentukan sikap tersendiri terhadap pertarungan internasional blok barat dan blok timur dan bukan menjadi objek politik internasional¹.

Kenetralan bangsa Indonesia terhadap kedua kubu didukung dengan disusunnya Pancasila sebagai dasar negara dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Pada tahun 1960 Soekarno menyampaikan kembali bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dalam pidatonya yang berjudul “Revolusi Kita” yang berbunyi “Pendirian kita yang Bebas-Aktif itu, secara setapak demi setapak harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, agar supaya tidak berat sebelah ke Barat atau ke Timur”².

Hubungan Indonesia dengan Suriah telah dibangun resmi pada tahun 1949. Sepanjang Revolusi Nasional Indonesia, Suriah termasuk negara paling awal, yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947, perwakilan Suriah di PBB, Faris Al-Khouri, telah mendorong agenda "pertanyaan

¹ “Headline Agustus 2017”, <https://gurupkn.com/politik-luar-negeri-bebas-aktif>, diakses 4 Februari 2018

²Ibid

Indonesia" yang akan didiskusikan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memicu dorongan internasional demi menghentikan *Aksi Polisionil* Belanda dan pada akhirnya berujung ke Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Suriah adalah negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Hubungan diplomatik telah terbangun secara tepat dan cepat pada tahun 1949³. Kedua negara mempunyai persepsi umum terkait isu Palestina, Irak dan Lebanon, dan Indonesia selalu mendukung Suriah dalam forum internasional perihal isu Dataran Tinggi Golan. Indonesia mempunyai kedutaan besar di Damaskus, sedang Suriah memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara merupakan anggota Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam⁴.

Awal mula perang Suriah terjadi pada bulan Maret 2011, demonstrasi pro-demokrasi yang terinspirasi oleh Musim Semi Arab (Arab Spring) meletus di kota selatan Deraa. Awal mula perang Suriah terjadi setelah penggunaan kekuatan mematikan pemerintah untuk menghancurkan perbedaan pendapat tersebut segera memicu demonstrasi nasional yang menuntut pengunduran diri presiden. Awal mula perang Suriah dimulai ketika kerusuhan menyebar, tindakan keras semakin meningkat. Para pendukung oposisi mengangkat senjata, pertama untuk membela diri dan kemudian mengusir pasukan keamanan dari daerah mereka. Assad berjanji untuk menghancurkan "terorisme yang didukung pihak asing" dan memulihkan kontrol atas negara. Kekerasan meningkat dengan cepat dan negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara, sekaligus menjadi awal mula perang

³"[Hubungan bilateral Suriah-Indonesia](#)". Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Diakses tanggal 5 April 2018.

⁴Veeramalla Anjaiah Januari 2014. "[RI to pledge \\$500,000 assistance to Syria](#)". The Jakarta Post. Diakses tanggal 4 April 2018.

Suriyah karena ratusan brigade pemberontak dibentuk untuk melawan pasukan pemerintah⁵.

Perang Suriyah ini menjadi lebih dari sekedar pertempuran antara mereka yang melawan Assad. Faktor kunci telah menjadi intervensi kekuatan regional dan dunia, termasuk Iran, Rusia, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Awal mula perang Suriyah terjadi dengan adanya dukungan militer, finansial dan politik mereka untuk pemerintah dan oposisi telah memberi kontribusi pada intensifikasi dan kelanjutan awal mula perang Suriyah tersebut menjadikan Suriyah sebagai medan pertempuran proxy⁶.

Kekuatan eksternal juga telah dituduh mendorong sektarianisme dalam kondisi negara yang sebelumnya terkenal sekuler, yang melibatkan mayoritas Sunni di negara tersebut terhadap sekte Syi'ah Alawite (Syi'ah Alawi) yang dianut presiden. Pembagian semacam itu mendorong kedua belah pihak untuk melakukan kekejaman yang tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa, tetapi juga menghancurkan komunitas, posisi yang sulit dan harapan yang meredup untuk penyelesaian politik. Perang Suriyah ditunjukkan dengan kelompok jihad yang berhasil merebut divisi tersebut, dan kemunculan mereka telah menambahkan dimensi di level lebih lanjut pada perang tersebut. Hayat Tahrir al-Sham, sebuah aliansi yang dibentuk oleh apa yang dulu merupakan Front al-Nusra yang berafiliasi dengan al-Qaeda, menguasai sebagian besar wilayah barat laut⁷.

⁵Mata-Mata Politik Maret 2018“Awal Mula Perang Suriyah: Bagaimana Konflik Panjang Dan Berdarah Bisa Terjadi?, <https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-perang-suriyah-bagaimana-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi/>, Diakses tanggal 16 April 2018

⁶Ibid

⁷Ibid

PBB mengatakan setidaknya 250.000 orang telah terbunuh. Namun, organisasi tersebut berhenti memperbarui angkanya pada bulan Agustus 2015. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebuah kelompok pemantau yang berbasis di Inggris, melaporkan pada bulan Desember 2017 bahwa mereka telah mendokumentasikan kematian lebih dari 346.600 orang, termasuk 103.000 warga sipil. Namun tercatat bahwa angka tersebut tidak termasuk 56.900 orang yang hilang dan diduga meninggal dunia. Pada bulan Februari 2016, sebuah kelompok pemikir memperkirakan bahwa konflik tersebut telah menyebabkan 470.000 kematian, baik secara langsung maupun tidak langsung. PBB memperkirakan akan membutuhkan \$3,5 milyar untuk membantu 13,1 juta orang yang memerlukan bantuan kemanusiaan di Suriah pada tahun 2018. Hampir 70 persen penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrim. Enam juta orang menghadapi kerawanan pangan akut di tengah kemiskinan dan kenaikan harga. Di beberapa daerah, orang menghabiskan 15-20 persen pendapatan mereka untuk mendapatkan akses terhadap air minum⁸.

Utusan khusus PBB dan Liga Arab untuk Suriah, Kofi Annan, mengalami kebuntuan untuk menghentikan pertikaian di Suriah, setelah usul enam agenda perdamaian yang diajukannya gagal diterapkan. Dewan HAM PBB mengadakan pertemuan pembahasan khusus membahas pelanggaran HAM di Suriah atas permintaan negara anggotanya. Sementara, Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB kembali bersidang dalam sebuah rapat tertutup untuk mengajukan usul baru bagi Suriah. Sebagai langkah lanjut, Annan menyiapkan rencana baru

⁸Ibid.

dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat sipil, perwakilan oposisi, negara yang pro maupun kontra kepada Pemerintahan Assad untuk duduk bersama mencari solusi damai bagi Suriah⁹.

Intensitas perang saudara di Suriah akan semakin meningkat karena Tentara Pembebasan Suriah (FSA) telah memberi tenggat waktu kepada Pemerintahan Assad untuk memenuhi rencana perdamaian internasional yang diajukan PBB. Pemerintahan Assad mengizinkan relawan Palang Merah Internasional masuk ke negaranya, namun menolak gencatan senjata. Presiden Assad menegaskan, kesuksesan usulan perdamaian PBB-Liga Arab sangat tergantung keberhasilan pemerintahannya memberantas apa yang disebutnya sebagai aksi teroris dan penyelundupan senjata. Pemerintahan Assad selama ini masih mendapat dukungan dari Rusia, China dan Iran. Kedua negara meyakini solusi atas krisis Suriah dapat tercapai melalui cara dialog damai dalam perundingan. Mereka tidak mendukung penjatuhan rezim Assad secara paksa karena dikawatirkan akan memicu gelombang balas dendam dari kaum Sunni terhadap minoritas Alawite pendukung Assad yang kini memimpin posisi penting di pemerintahan dan militer¹⁰.

Di lain pihak, AS mulai menyerukan intervensi militer internasional di Suriah. Dalam pandangan AS, jika DK PBB tidak mengambil tindakan tegas, negara-negara anggota bisa bertindak tanpa PBB. Gerakan negara-negara Barat yang dipimpin AS terus mengkaji opsi, di antaranya intervensi militer atas nama masyarakat internasional. AS telah memimpin latihan perang di Jordania dekat

⁹Pujiyanti, 2012. “ Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Krisis Suriah”Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV, No. 11/I/P3DI/Juni/2012

¹⁰Ibid

perbatasan Suriah dengan melibatkan 11.000 tentara dari 19 negara. Latihan perang bertajuk “Singa Siaga” ini menjadi persiapan untuk intervensi militer cepat di Suriah, dan mencegah senjata kimia dan biologi di negara tersebut jatuh ke tangan teroris jika rezim Assad tumbang¹¹.

Sementara itu, di kalangan Muslim dunia, konflik Suriah merembet menjadi konflik-konflik lokal akibat faktor idealpolitics (ideologis). Narasi media mainstream dan media-media lokal yang didanai negara-negara Muslim pemegang saham perang (Arab Saudi, Turki, Qatar, dll), selalu menggiring opini publik ke arah isu sektarian (“Assad Syiah membantai Sunni”). Terutama di Indonesia, *hatespeech* terhadap pemeluk Syiah (yang jumlahnya sangat minoritas) disebarluaskan secara masif dan terstruktur (melalui seminar, majlis taklim, pembagian buku anti-Syiah secara gratis hingga jutaan eksemplar di seluruh Indonesia; gerakan semasif ini tidak mungkin terjadi tanpa ada dukungan dana yang sangat besar, dan terindikasi sumber dana tersebut adalah negara-negara pemegang saham perang). Situasi ini tidak hanya membahayakan kaum Syiah saja, melainkan persatuan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena, modus *hatespeech* yang dilakukan dengan mudah bergeser ke pihak-pihak lain, mulai dari ulama Sunni yang dituduh Syiah, Ahmadiyah, hingga kaum Nasrani (atau etnis China)¹². Indonesia sangat khawatir dengan semakin memburuknya situasi kemanusiaan di Aleppo, Suriah. Konflik di Suriah telah memakan banyak korban dari kalangan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak.

¹¹Ibid

¹²Dina Sulaeman Maret 2016, “Suriah dan Internasionalisasi Konflik” <http://ic-mes.org/politics/paper-suriah-dan-internasionalisasi-konflik/>. Diakses tanggal 16 April 2018

Oleh karena itu penulis ingin menganalisa sikap Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo di tahun 2015-2018 ini terhadap suriah dengan judul **“PERAN INDONESIA DALAM KONFLIK SURIAH (Studi Kasus Era Kabinet Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015-2018) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu dirumuskan suatu masalah yang akan dipecahkan/ diselesaikan pada penelitian/ perancangan ini. Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

Bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Suriah pada Era Kabinet Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015-2018?

C. Landasan Pemikiran

Sebagai pedoman untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teoritis yang di dalamnya berisi teori-teori para pakar yang memiliki korelasi dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat, Adapun teori tentang Hubungan Internasional sampai dengan teori yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan, teori perimbangan kekuatan, dan teori konflik yang penulis nilai sesuai dengan objek penelitian.

Dalam bagian kerangka teoritis ini, penulis akan mengemukakan batasan-batasan berupa kutipan teori-teori dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti penulis.

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Oleh sebab itu, politik luar negeri sebuah negara menentukan arah, warna dan pola pergaulan negara dalam kancan regional maupun global. Pembentukan paradigma tentang dunia ini dipengaruhi oleh sejarah, kondisi sosial, geografis, maupun nilai-nilai sosial dan agama yang mendasari sistem di negara tersebut¹³.

Sementara itu kebijakan luar negeri adalah strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Kebijakan luar negeri suatu negara dapat berbeda-beda dari satu pemerintahan dengan pemerintahan lain yang menggantikannya. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi juga oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, politik, sosial maupun keamanan dalam negeri, sehingga tidak seperti politik luar negeri yang cenderung tetap, kebijakan luar negeri bersifat temporer sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut, sehingga kebijakan luar negeri merupakan bagian (*instrument*) dari politik luar negeri.

Pengertian Hubungan Internasional menurut Charles McClelland adalah:

“Hubungan Internasional sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus, informasi, serta berbagai respon perilaku yang muncul di antara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponen¹⁴.”

¹³<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0509/19/opini/2054757.htm> oleh Cecep Zakaria, *Politik Luar Negeri Indonesia: Potensi Kerjasama Bisnis Indonesia – Arab*, diakses pada tanggal 04 Agustus 2018

¹⁴Charles A. McClelland, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem* Jakarta: CV. Rajawali, 1981, hlm.25.

Sedangkan menurut K.J. Holsti, Hubungan Internasional didefinisikan sebagai berikut:

“Semua bentuk interaksi antar masyarakat yang berbeda, apakah itu disponsori oleh pemerintah atau tidak ia juga mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, turisme, perdagangan internasional, turisme, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai dan etika politik internasional¹⁵”

Suatu negara lazimnya berusaha mewujudkan tujuan nasionalnya melalui formulasi kebijaksanaan politik luar negeri. Dalam hal ini Holsti berpendapat bahwa: Kebijakan, sikap atau tindakan suatu negara merupakan output politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk (1) menanggulangi permasalahan, (2) mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional.¹⁶

Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu: Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middle-term*), dan jangka panjang (*long-term*).
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.¹⁷

Pelaksanaan politik luar negeri didahului oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan oleh pemerintah dan instansi terkait baik dalam kapasitas sebagai

¹⁵Holsti, K. J. *International Politics: A Frame for Analysis*. New Jersey. 1987, Hal. 134

¹⁶*Ibid*, hal. 131

¹⁷*Ibid*, hal. 51-52

konseptor maupun eksekutor kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal seperti aspirasi konstituen domestik, elemen masyarakat sipil (*civil society*), dan faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal seperti peta kepentingan-kepentingan kekuatan internasional. Di samping itu, dalam pelaksanaan politik luar negeri harus dipilih teknik atau instrumen yang cocok untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan kekuatan nasional (*national power*).

Suatu negara bisa mengabaikan motif keuntungan dan menggunakan kebutuhan ekonomi negara lain untuk memperluas pengaruh politiknya, baik melalui perdagangan yang dilakukan langsung dari pemerintah maupun swasta. Holsti(1995), dalam bukunya *International Politics: A Framework for Analysis*, membuat suatu kerangka analisis instrumen perdagangan dalam politik luar negeri yang biasanya dilakukan dengan tiga maksud, yaitu : a. Mencapai sasaran luar negeri dengan mengeksploitasi kebutuhan dan ketergantungan ekonomi dan mengajukan imbalan ekonomi, atau melakukan ancaman menerapkan sanksi ekonomi; b. Meningkatkan kapabilitas negara, atau meniadakan potensi kapabilitas negara lawan; dan c. Menciptakan satelit ekonomi (yaitu, dengan jaminan pemasaran dan sumber persediaan) atau membantu mempertahankan ketaatan politik negara-negara satelit atau menciptakan “ruang pengaruh” dengan membentuk hubungan ketergantungan ekonomi.¹⁸

¹⁸*Ibid*, hal. 303

Definisi tersebut diatas belum memberikan jawaban terhadap banyak pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dibelakang putusan dari pelaksanaan politik luar negeri. Kita juga perlu mengetahui apakah terdapat unsur-unsur konflik atau kerjasama dalam politik luar negeri tersebut, apa hubungan politik luar negeri dengan politik dalam negeri, yakni apakah peristiwa-peristiwa didalam negeri mempunyai konsekwensi-konsekwensi internasional, atau sebaliknya politik luar negeri itu mempunyai dampak-dampak domestik.

Dalam kaitan ini, Indonesia berdasarkan kapasitasnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia telah mengambil upaya-upaya untuk menengahi konflik Suriah. Posisi Indonesia sejak lama mendukung terus berlanjutnya proses penyelesaian damai serta menyatakan komitmennya bagi kemerdekaan Suriah yang berdaulat dan langgeng serta hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Kebijakan Indonesia terhadap konflik Suriah telah konsisten untuk memperjuangkan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Hal tersebut tidak lepas dari kepribadian nasional, kebudayaan, idiologi, sejarah masa lampau, lokasi geografik negara Indonesia yang mempunyai peranan dalam penentuan politik luar negerinya.

Konsep Peranan Nasional

Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan Juanda dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” yaitu;

“Konsep peranan bisa dianggap definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga mereflesikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta

sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi¹⁹”

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur sosial.

Menurut Holsti dalam Rudy, ada 16 tipe peranan nasional yang menjadi komponen luar negeri suatu Negara²⁰. Peran tersebut yaitu 1) Benteng revolusi pembebas yaitu pemerintah wajib mengorganisasikan atau memimpin berbagai tipe gerakan revolusioner, 2) pemimpin regional yaitu kewajiban atau tanggungjawab khusus yang dirasakan oleh suatu pemerintah terhadap suatu wilayah atau kawasan, 3) pelindung regional yaitu peran yang menekankan pemberian proteksi bagi wilayah yang berdekatan, 4) bebas aktif yaitu politik pemerintah yang mendukung strategi nonblok tidak lebih daripada afirmasi peran merdeka dalam kebijakan luar negeri, 5) pendukung pembebasan yaitu peran kubu revolusi peran pendukung pembebasan tidak menunjukkan tanggung jawab formal, 6) agen antiimperialis yaitu imperialisme dirasakan sebagai suatu ancaman dan pemerintah menyatakan perjuangan menentang ancaman, 7) pembela kepercayaan yaitu pemerintah memandang bahwa tugas kebijakan luar negeri adalah untuk membela nilai tertentu dari serangan, 8) mediator-pemersatu yaitu

¹⁹*Ibid.* Hlm:159

²⁰*Ibid.* Hlm:377

pemerintah kontemporer memandang diri mampu untuk bertanggungjawab, 9) kolaborator subsistem regional yaitukategori mediator pemersatu dalam arti tidak hanya membayangkan antarposisi yang kadang ke dalam kawasan atau isu konflik, 10) pembangunan yaitu menunjukkan suatu tugas atau kewajiban khusus untuk membantu negarayang sedang membangun, 11) jembatan yaitu peran yang muncul dalam bentuk samar, 12) sekutu yang setia yaitu pembuat kebijakan memandang kebanyakan aliansi dewasa ini sebagai usulan satu pihak, 13) merdeka yaitu peran yang dinyatakan oleh pemimpin sebagai besar negara kontemporer, 14) teladan yaitu peran yang menekankan pentingnya peningkatan prestise, 15) pembangunan dalam negeri yaitu peran yang mengacu tugas atau fungsi tertentu dalam sistem internasional, 16) konsep peran lain yaitu gagasan mengenai pengimbang suatu peran yang bersifat tradisional dalam sejarah diplomasi.

Peranan yang masuk dalam penelitian ini adalah tipe bebas aktif. Pengertian dari bebas aktif ialah pernyataan politik pemerintah yang mendukung strategi nonblok tidak lebih daripada afirmasi peran “merdeka” dalam kebijakan luar negeri²¹. Tetapi beberapa negara berpendapat bahwa kemerdekaan tidak harus berarti isolasi atau ketidakterlibatan melalui pembinaan hubungan diplomatik dengan sebanyak mungkin negara, dan kadang-kadang melibatkan diri sebagai mediator dalam konflik blok.

Prinsip bebas aktif sebagai sumber kebijakan luar negeri telah diadopsi sejak awal kemerdekaan. Prinsip ini tetap digunakan dan seringkali menjadi acuan

²¹*Ibid.* Hlm:378

dalam mengukur kebijakan luar negeri Indonesia. Holsti menyebut sumber utama dalam kebijakan luar negeri adalah konsepsi peran nasional dan *role prescription* atau harapan peran dari lingkungan internasional. Konsepsi peran nasional dapat bersumber dari ideologi atau prinsip dasar politik luar negeri yang dimiliki negara, misalnya Undang – Undang atau peraturan negara. Sumber lain dari konsepsi peran adalah kepentingan nasional. Sedangkan sumber dari harapan peran dapat berasal dari negara tetangga, lingkungan internasional, maupun norma dan hukum internasional yang berlaku. Jika teori ini diaplikasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka politik luar negeri Indonesia bersumber dari konsepsi peran berupa prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional. Sedangkan harapan peran untuk Indonesia muncul dari lingkungan internasional yang berubah dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Perpaduan dua hal inilah yang kemudian menjadi output kebijakan luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun sekelompok negara lain, yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan tertentu.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, Pemerintah Indonesia mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Wakil Presiden RI pertama Drs. Moh. Hatta mencetuskan gagasannya mengenai prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh politik negara asing atau blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa. Aktif artinya dengan sumbangan realitas giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain²².

Prinsip bebas aktif telah menjadi prinsip tunggal kebijakan luar negeri Indonesia sejak masa kemerdekaan. Dengan situasi regional dan global saat ini, Indonesia menghadapi tantangan untuk menentukan arah pelaksanaan prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negerinya agar dapat tetap melayani kepentingan nasional. Bebas aktif akan tetap menjadi prinsip yang melandasi kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam penerapan prinsip tersebut, kepentingan nasional akan selalu menjadi tujuan utama sehingga setiap kebijakan luar negeri dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat Indonesia. Indonesia senantiasa mempertahankan dan memperkuat kerja sama internasional yang telah terbangun baik dalam isu seperti terorisme, pembangunan berkelanjutan, operasi pasukan penjaga perdamaian maupun isu-isu internasional lainnya²³.

²²A. W. Widjaja, *Indonesia, Asia Afrika, Non Blok: Politik Bebas Aktif*. Jakarta: Bina Aksara, 1986. hlm.14.

²³Kementrian Luar negeri Republik Indonesia, 2016. Kementerian Luar Negeri Jelaskan Esensi Prinsip Bebas Aktif di Polugri RI. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/bebas-aktif.aspx>. diakses pada 22 JANuari 2019.

Setelah Perang Dingin berakhir, prinsip bebas aktif politik luar negeri Indonesia sudah kehilangan konteksnya. Namun demikian, pemaknaan prinsip tersebut lebih pada bagaimana Indonesia menjadi negara yang mandiri dan mampu memerankan peranan penting dalam pergulatan dunia internasional. Hal ini sebenarnya seperti apa yang ditafsirkan sendiri oleh Moh. Hatta;

“Politik luar negeri Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan kita sendiri dan dijalankan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang kita hadapi... politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh politik negara lain yang diputuskan berdasarkan atas kepentingan negara tersebut²⁷.”

Dari tafsiran diatas, Indonesia juga harus mampu cermat dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang dapat menguntungkan kepentingan nasionalnya. Drs. Moh. Hatta juga mengatakan, bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut²⁸:

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.
3. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia.

Corak politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif atas kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia internasional, tetapi aktif dalam mengambil peranan di dalamnya. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia mendudukkan dirinya sebagai subjek dalam hubungan luar negerinya, dan tidak sebagai objek. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan nasional negara itu sendiri. Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif. Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut: Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif.

Apabila kita simpulkan dari uraian di atas, maka tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah sebagai berikut²⁴;

²⁴Soemadi D.M. Brotodiningrat, *Perjalanan Politik Luar Negeri Indonesia di Kancah Global: Sebuah Refleksi*, Jurnal Diplomasi Volume 4 No. 1, Maret 2012, hlm 4

1. Untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa
2. Ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat
3. Menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.

Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut²⁵:

1. Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersama-sama dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian dunia
2. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia.
3. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional
4. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB.

Dalam kaitan ini politik luar negeri Indonesia selalu memberikan dukungan terhadap suriah yang dipastikan memberikan nuansa positif dan signifikan bagi kinerja politik luar negeri Indonesia yang mulai pro aktif dan *high profile* dalam turut membantu menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan

²⁵*Ibid*

amanat UUD 1945. Indonesia selalu menyambut baik upaya perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh baik PBB maupun OKI, termasuk diantaranya Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al Sheikh (1999), Inisiatif Perdamaian Liga Arab (2002) serta Peta Jalan Perdamaian (Road-Map 2003) gagasan quarter AS, Russia, PBB dan Uni Eropa yang diharapkan dapat kembali dilaksanakan untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina²⁶.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

1. Indonesia mengambil peran bebas tidak memilih salah satu blog antara yang masuk kedalam konflik di Suriah .
2. Indonesia mengambil peran aktif yaitu aktif dengan mengeluarkan berbagai inisiatif kebijakan membantu penyelesaian konflik Suriah, aktif dalam pemulangan WNI yang ada di Suriah secara aman, dan Indonesia aktif mendorong diberikan bantuan kemanusiaan untuk warga Suriah.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian tentang sikap indonesia terkait konflik Suriah berimplikasi pada hubungan Indonesia dan suriah Stabilitas, yang diantaranya adalah :

²⁶Ahmad. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional. <https://studylibid.com/doc/290791/bab-8-pemantapan-politik-luar-negeri>. diakses pada tanggal 18 September 2018.

Untuk mengetahui bagaimana peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Suriah pada Era Kabinet Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2015-2018.

F. Metode Penelitian

1. Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan level analisis *state* dan *system* atau Negara-bangsa dan Sistem untuk melihat bagaimana Negara-bangsa mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan serta sistem yang mengaturnya. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada bagaimana suatu Negara memberikan rangsangan dan respon terkait kebijakan Negara lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya serta sistem yang mengatur di dalamnya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analisis yang diantaranya dijabarkan sebagai berikut :

- a) **Metode Deskriptif Analisis** : Metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan dan pengantisipasi yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia di era Joko Widodo dalam membuat resolusi mengenai

permasalahan di Suriah serta perbedaan pandangan dengan pemerintah sebelumnya dalam Resolusi di Suriah, yang didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat actual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena tersebut, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari bagaimana Indonesia saling memberikan aksi reaksi ditengah konflik suriah.

- b) **Metode Historis Analistis** : Metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta khusus mengenai kejadian masa lampau yang berkaitan dengan kerjasama bilateral Indonesia dan Suriah, juga dengan sejarah Negara-negara Timur Tengah yang merupakan negara muslim. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu. Metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomperasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi pada masa yang akan datang.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi tentang peran konflik Suriah.

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 : Bab I merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi, rumusan masalah. Dimana disertakan juga tentang tujuan dan kegunaan penelitian, serta dilengkapi dengan kerangka teoritis dan hipotesis. Metode Penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Umum tentang hubungan Indonesia dan Suriah.

Bab III: Tinjauan Umum Konflik Suriah menjelaskan tentang dinamika konflik Suriah, Sejarah Suriah, sebab-sebab terjadinya konflik Suriah, pihak-pihak yang bertikai dalam konflik Suriah serta dampak konflik Suriah. → paparkan dalam satu paragraph, putuskan di akhir kalimat

Bab IV Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Suriah Tahun 2015-2018. Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Suriah Tahun 2015-2018

Bab V : Penutup. Bab V merupakan penutup dari penulisan penelitian yang perlu memberikan beberapa kesimpulan dari data yang telah di ambil dan di teliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN INDONESIA DAN SURIAH

Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang hubungan Indonesia dan Suriah yaitu tentang sejarah hubungan Indonesia dengan Suriah, hubungan bilateral Indonesia dengan Suriah.

A. Sejarah Hubungan Indonesia dengan Suriah

Hubungan Indonesia dengan Suriah telah dibangun resmi pada 1949, dan ada di antara pengakuan internasional paling awal atas kemerdekaan Indonesia²⁷. Kedua negara mempunyai persepsi umum terkait isu Palestina, Irak dan Lebanon, dan Indonesia selalu mendukung Suriah dalam forum internasional perihal isu Dataran Tinggi Golan²⁸. Berkaitan dengan kejadian perang sipil Suriah saat ini, Indonesia telah mendorong semua partai di Suriah menghentikan kekerasan²⁹, sambil berjanji menyediakan US\$500.000 senilai bantuan kemanusiaan negara Suriah yang dilanda konflik pada 2014. Sebelumnya Indonesia telah mendonasikan dengan jumlah yang sama ke Suriah pada 2012 dan 2013 di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)³⁰. Indonesia mempunyai kedutaan besar di Damaskus, sedang Suriah memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara merupakan anggota Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam.

²⁷^{abc} "[Hubungan bilateral Suriah-Indonesia](#)" (dalam bahasa Indonesian). Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Diakses tanggal 4 Mei 2014.

²⁸^{ab} Veeramalla Anjaiah (3 April 2009). "[Syria seeks stronger ties with Indonesia: Envoy](#)". The Jakarta Post. Diakses tanggal 4 Mei 2014.

²⁹ Ella Syafputri (25 Februari 2012). "[Indonesia urges all parties in Syria to end violence](#)". Antara News. Diakses tanggal 4 Mei 2014.

³⁰ Veeramalla Anjaiah (16 Januari 2014). "[RI to pledge \\$500,000 assistance to Syria](#)". The Jakarta Post. Diakses tanggal 4 Mei 2014.

Sepanjang Revolusi Nasional Indonesia, Suriah termasuk negara paling awal, yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947, perwakilan Suriah di PBB, Faris Al-Khouri, telah mendorong agenda "pertanyaan Indonesia" yang akan didiskusikan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memicu dorongan internasional demi menghentikan *Aksi Polisionil* Belanda dan pada akhirnya berujung ke Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Suriah adalah negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Hubungan diplomatik telah terbangun secara tepat dan cepat pada tahun 1949³¹. Presiden Indonesia Suharto berkunjung ke Suriah pada Oktober 1977. PM Suriah Mahmoud Zubei mengunjungi Indonesia pada Juni 1997, dan PM Suriah Naji Ottri pada Januari 2009³².

B. Hubungan Bilateral Indonesia- Suriah

1. Bidang Politik

Hubungan politik Indonesia – Suriah telah dimulai sejak pengakuan ”*de jure*” Suriah terhadap Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 1947. Hubungan diplomatik kedua negara dimulai tahun 1950. Indonesia menempatkan seorang Kuasa Usaha di Damascus tahun 1955. Pada saat Suriah bergabung dengan Mesir dalam ” Republik Persatuan Arab tahun 1959, Perwakilan RI di Damascus

³¹Anjanayah "[Hubungan bilateral Suriah-Indonesia](#)" (dalam bahasa Indonesian). Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia. Diakses tanggal 4 Mei 2014.

³²*Ibid.*

dirubah menjadi Konsulat jenderal dan ketika RPA pecah tahun 1961, konsulat jenderal di Daascus kembali menjadi KBRI³³.

Antara kedua negara terdapat ” memorandum Saling pengertian mengenai pembentukan Konsultasi Bilateral” yang ditandatangani di Jakarta tanggal 27 Juni 1997, guna mengkaji kembali seluruh aspek yang ada dalam hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, perdagangan, teknik, kebudayaan dan untuk melakukan pertukaran pandangan mengenai masalah-masalah internasional yang menjadi kepentingan bersama serta interaksi di area internasional.

Kerjasama di fora internasional antara kedua negara juga berkembang baik tercermin dari saling memnita/memberi dukungan dalam pencalonan untuk menduduki posisi/jabatan pada organisasi-organisasi internasional. Di samping itu, hal ini juga didorong oleh peranan menonjol Suriah di PBB dan berbagai organisasi internasional atau regional lainnya, seperti dalam GNB, OKI dan Liga Arab. Dalam menyikapi masalah internasional seperti Irak, Suriah dalam kerangka Liga Arab mempunyai pandangan yang sama dengan Indonesia.

Hubungan bilateral kedua negara semakin ditingkatkan dengan kunjungan Menlu RI ke Suriah tanggal 4 – 5 Februari 2007. dalam kunjungan ini ditandatangani dua kesepakatan bidang ekonomi kedua negara antara lain *Agreement on Economic, Scientific, and technical cooperation* dan *memorandum of Understanding on the establishment of a Joint Commission for the economic,*

³³Kementrian Luar Negeri.Laporan Kunjungan Delegasi Komisi I DPR-RI Ke Negara Syria. <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Kunjungan-Delegasi-Komisi-I-DPR-RI-ke-Suriah.aspx>. diakses pada 9 Maret 2019.

Scientific, technical, and Cultural Cooperation. Kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan pertukaran kunjungan pejabat di antara kedua negara. Dalam kaitan ini, Presiden Suriah bersedia untuk berkunjung ke Indonesia pada paruh kedua tahun 2007.

Terkait dengan peran aktif Indonesia di Timur Tengah, terungkap bahwa Pemerintah Suriah justru mengharapkan peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik Timur Tengah. Pemerintah Suriah menilai bahwa keanggotaan Indonesia di DK PBB merupakan kesempatan yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk berperan aktif di Timur tengah mengingat berbagai upaya yang dilakukan AS, Uni Eropa, dan beberapa negara Arab telah gagal dalam melakukan mediasi untuk meredakan ketegangan dan melanjutkan perundingan proses perdamaian di Timur Tengah.

2. Ekonomi dan perdagangan

Perdagangan bilateral mencapai US\$47,08 juta pada 2003 dan menguat jadi US\$100 juta pada 2008. Neraca perdagangan condong ke Indonesia, yang utamanya mengekspor tekstil, karet, teh, kopi, minyak sawit, kayu dan kertas ke Suriah. Sementara Indonesia mengimpor utamanya kurma, buah-buahan kering dan minyak zaitun dari Suriah³⁴.

3. Bidang Pertahanan Keamanan

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, antara Indonesia dan Suriah belum mempunyai perjanjian di bidang tersebut.

³⁴Veeramalla Anjaiah (3 April 2009). [*"Syria seeks stronger ties with Indonesia: Envoy"*](#). *The Jakarta Post*. Diakses tanggal 4 Januari 2019.

Pertemuan – Pertemuan Indonesia-Suriah

- a. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Dr. Mahmoud Abrash Selasa, 30 Oktober 2007

Kunjungan kehormatan dan pertemuan dengan Ketua Parlemen Suriah Dr. Mahmoud Abrash berlangsung di Kantor Parlemen Suriah dan dihadiri pula oleh para ketua Komisi di parlemen Suriah, Mengawali sambutan, dr, Abrash menegaskan bahwa kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI ke Suriah memiliki nilai khusus, yakni tidak sekedar kunjungan dari negara sahabat tetapi lebih merupakan kunjungan dari negara saudara yang sangat dekat hati rakyat, bangsa dan pemerintah Suriah. Abrash mengikuti dengan seksama perkembangan terkini di Indonesia yang dinilai sebagai salahsatu negara yang memiliki sistem pemerintahan efektif di Asia. Indonesia juga dikenal luas oleh bangsa Suriah sebagai salah satu pencetus Gerakan Non Blok yang senantiasa gigih memperjuangkan kemajuan negara dunia ketiga yang selalu terkendala karena dominasi dan ketidakadilan perlakuan dari negara-negara besar dan maju, khususnya Amerika Serikat. Ditegaskan pula bahwa Suriah pada dasarnya tidak melancarkan sikap permusuhan dan anti AS namun anti terhadap negara-negara yang senantiasa berupaya untuk menekan dan menghambat perkembangan dan kemajuan Suriah. Dalam kaitan ini, kunjungan delegasi Parlemen Indonesia ke Suriah tidak hanya merefleksikan kedekatan hubungan dan kerjasama antar parlemen dalam konteks official, tetapi juga kedekatan hubungan personal di kalangan anggota parlemen kedua negara. Dr. Abrash juga menggarisbawahi bahwa hubungan yang erat dan

kokoh antar parlemen dapat menjadi kekuatan yang keterbelakangan akibat desain politik yang dirancang dan diterapkan negara-negara maju.

Menyinggung situasi dalam negeri dan perkembangan wilayah, Dr. Abrash menegaskan bahwa rakyat Suriah pada dasarnya bersikap tetap sabar dalam menghadapi tekanan yang sedang dialami namun tegas dalam mengambil sikap. Rakyat Suriah adalah cinta damai dan senantiasa mendambakan perdamaian. Suriah telah melancarkan serangkaian prakarsa perdamaian di kawasan Timur tengah namun tak satupun diterima oleh Israel. Suriah juga tidak ingin bermusuhan dengan negara lain tetapi justru negara lain yang terus menerus melancarkan sikap permusuhan terhadap Suriah. Bahkan hingga kini masih ada upaya-upaya untuk menggambarkan wajah dan kondisi rakyat Suriah yang tidak bersahabat. Rakyat Suriah tidak menginginkan terjadinya instabilitas di kawasan dan mendukung sepenuhnya keutuhan terjadinya instabilitas di kawasan dan mendukung sepenuhnya keutuhan wilayah Lebanon dan Irak. Instabilitas dan perpecahan politik di kedua negara tetangga tersebut hanya akan memberikan dampak kurang menguntungkan bagi Suriah. Oleh karena itu, Suriah aktifmenggalang upaya rekonsiliasi, baik di Irak, palestina maupun Lebanon.

Menanggapi sambutan dan pernyataan Ketua Parlemen Suriah. Ketua Delegasi Komisi I DPR-RI menyampaikan apresiasinya atas penerimaan dan sambutan yang sangat baik dan hangat di pihak Suriah, mulai saat ketibaan delegasi di perbatasan Suriah –Lebanon yang disambut langsung oleh Ketua Komisi Pertahanan nasional Parlemen Suriah. Kenyataan tersebut merefleksikan dan semakin mengukuhkan bahwa hubungan kedua negara betul-betul memiliki

landasan dan dimensi persaudaraan yang erat dan kokoh. Ketua delegasi juga sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah disampaikan Ketua Parlemen Suriah.

b. Pertemuan dengan Ketua Komisi Pertahanan Nasional Parlemen Suriah
Selasa, 30 Oktober 2007

Ketua komisi Pertahanan nasional Parlemen Suriah, jenderal (Purn.) Fajar Isa beserta seluruh anggota Komisi menyambut gemmbira kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI yang digambarkannya sebagai kunjungan persaudaraan anatar parlemen kedua bangsa. Disampaikan pula bahwa banyak persamaan yang dilandasi dan mendasari hubungan RI-Suriah pada tataran bilateral, regional dan internasional. Semangat KAA Bandung yang menjadi cikal bakal dan inspirasi pergerakan perjuangan kemerdekaan negara-negara terjajah, akan selalu diingat rakyat Suriah. Menurutnya semangat bandung menjadi semakin relevan dan perlu dihidupkan kembali pada situasi sekarang dimana dunia menyaksikan tumbuh dan berkembangannya unilateralisme.

Menyinggung situasi di kawasan, Ketua Komisi Pertahanan juga menjelaskan bahwa tekanan yang dilancarkan AS terhadap Suriah memang belum mereda dan bahkan cenderung menguat. Kenyataan tersebut terkait erat dengan haluan politik neo-conservatism di AS yang diarahkan untuk dua tujuan pokok, yaitu memperkuat posisi Israel di kawasan dan upaya untuk menguasai sumber minyak. Meski upaya-upaya pengucilan terus dilancarkan, namun menurutnya, Suriah merasa tidak terisolasi dan tak gentar menghadapi realita tersebut karena seluruh rakyat Suriah yakin akan kemampuan yang dimilikinya, yaitu

kepemimpinan nasional yang kuat, partai politik yang solid dan kemampuan angkatan bersenjata.

Menanggapi hal tersebut, Ketua delegasi Komisi I DPR-RI sekali lagi menyampaikan terima kasih atas sambutan dan penerimaan yang sangat hangat dan bahkan disambut langsung oleh Ketua komisi Pertahanan sejak tiba di perbatasan. Suriah tidak hanya dicatat sebagai salah satu negara Arab yang pertama memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, tetapi juga hingga kini senantiasa memberikan dukungan pada posisi Indonesia di berbagai forum internasional. Dinyatakan pula bahwa Indonesia dan Suriah memiliki sikap dan pandangan yang sama dan satu bahasa dalam menyikapi isu-isu di kawasan, khususnya perjuangan rakyat Palestina dan Irak. Rakyat Indonesia berkeyakinan bahwa Suriah dibawah kepemimpinan Presiden Bashar Al Assad akan terus mencapai perkembangan menuju bangsa yang lebih kuat di berbagai bidang.

c. Pertemuan dengan Ketua Komisi Arab dan Luar Negeri Selasa, 30 Oktober 2007

Ketua Komisi Arab dan Luar negeri parlemen Suriah Dr. Sulaiman Al-hadad menyampaikan bahwa hubungan parlemen RI-Suriah telah terjalin dengan erat yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kerjasama parlemen di negara-negara Asia dan mendodrong kerjasama parlemen dunia yang lebih kuat. Sedangkan mengenai situasi di kawasan, Dr. Sulaiman Al-Hadad menyatakan bahwa Israel tidak memiliki kredibilitas untuk melaksanakan perdamaian karena dari hampir 60 resolusi yang dikeluarkan PBB tidak pernah dilaksanakan oleh Israel bahkan tetap melakukan penghancuran terhadap tempat-

tempat suci di palestina. Dalam kaitan ini, Siria juga mengharapkan agar Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat palestina. Ditegaskan pula bahwa setiap upaya perdamaian di lebanon yang pada akhirnya dapat memberikan iklim kondusif bagi peningkatan kegiatan ekonomi Siria.

Sementara itu, Ketua delegasi Komisi I DPR-RI menyampaikan perlunya bagi pemerintah kedua negara merealisasikan berbagai kesepakatan dan MOU kerjasama bilateral yang ditandatangani pada Januari 2007 dalam bentuk kerjasama nyata di berbagai bidang. Dengan demikian maka akan semakin mendorong peningkatan kerjasama kedua negara. Khusus mengenai masalah tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Siria, Ketua delegasi mengharapkan kiranya dapat dilakukan pelayanan dan perlindungan yang memadai oleh instansi berwenang di Siria. Pihak Siria menyatakan bahwa belum lama ini telah dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja asing sektor informal di Siria. Menanggapi hal tersebut, Dubes RI Damaskus menambahkan bahwa pada akhir November 2007 delegasi dari Deplu yang dipimpin Dirjen HPI akan mengadakan pertemuan di Siria untuk pembahasan dan/atau penandatanganan MOU ketenagakerjaan RI-Siria.

d. Pertemuan dengan Menteri Pertahanan Siria, H.E. Letjen. Hassan Turkmani

Rabu, 31 Oktober 2007

Membuka pembicaraan, Menhan Siria menyatakan bahwa kunjungan delegasi parlemen adalah mewakili rakyat Indonesia sehingga kunjungan ini menunjukkan kesinambungan sikap dan dukungan Indonesia kepada Siria.

Kunjungan ke Suriah juga merupakan kesempatan baik untuk melihat dan mengamati secara langsung dinamika dan perkembangan politik di Suriah lebih lanjut. Menhan mengatakan bahwa situasi di Timur tengah saat ini pada titik yang membahayakan karena langkah apapun bisa terjadi, termasuk invansi militer, hegemoni ekonomi dan kebudayaan untuk menguasai kawasan Timur tengah. Menurut Menhan, AS adalah sumber terjadinya ketegangan di kawasan dan Suriah akan terus berjuang untuk mengatasi ketidakadilan. Menhan menjelaskan bahwa Suriah membangun angkatan bersenjata dengan landasan ideologi perjuangan, utamanya untuk membebaskan dan merebut kembali wilayah yang diduduki Israel. Suriah juga mendukung semua gerakan perlawanan untuk mewujudkan kemersdekaan. Suriah menilai bahwa seluruh bangsa yang tertindas berhak melakukan perlawanan meskipun AS melihat hal tersebut sebagai aksi akan menyebabkan kerugian dan kesengsaraan warga sipil. Jika perjuangan Suriah mendukung pembebasan Palestina dan Irak disebut sebagai terorisme maka Suriah menyatakan tak akan gentar disebut sebagai teroris. Suriah juga tidak punya ambisi dengan wilayah-wilayah disekitar dan ideologi politik.

Suriah tidak memberi peluang bagi kepemilikan senjata pemusnah massal, namun pihak barat selalu berupaya memutarbalikkan fakta dan kenyataan di Suriah dengan satu tujuan agar Suriah tidak berhasil mencapai sasaran dan tujuan nasionalnya. Ketua delegasi menanggapi pernyataan Menhan dengan menegaskan bahwa situasi politik dan kondisi yang sedang dihadapi Suriah memang tidak mudah dan rakyat Indonesia dapat memahami apa yang sedang dialami rakyat Suriah. Dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan Suriah merebut kembali

wilayah yang diduduki Israel tidak akan pernah berhenti karena itu merupakan masalah pokok dalam sengketa Arab-Israel. Indonesia bersama-sama dengan negara lain menentang unilateralisme sebagaimana dijalankan AS dan berupaya mendorong multilateralisme dalam penanganan berbagai isu internasional.

Delegasi Komisi I DPR-RI juga menanyakan peristiwa pelanggaran udara yang dilakukan oleh pesawat Israel di Suriah baru-baru ini. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari manuver israel untuk memacu kembali semangat mental tentara dan rakyat Israel yang mulai meredup karena kekalahan pada perang Juli 2006. Suriah menyatakan tidak akan menanggapi langkah provokasi tersebut karena hanya memancing langkah militer selanjutnya.

Pada bagian lain, anggota delegasi Komisi I DPR-RI juga menyampaikan bahwa Indonesia kini tengah mengembangkan berbagai industri strategis yang amat penting bagi pertahanan nasional. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong pemerintah Indonesia untuk memnjajagi peluang kerjasama di bidang industri strategis dan kerjasama pertahanan melalui pertukaran informasi dan kerjasama teknik lainnya. Menanggapi hal tersebut, Dubes RI Damaskus juga menyampaikan bahwa Dubes RI telah menerima undangan dan akan menyampaikan paparan pada kursus reguler pertahanan yang diselenggarakan oleh kementerian Pertahanan Suriah yang dijadwalkan pada Januari 2008 mengenai potensi dan peluang kerjasama bilateral.

e. Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Moalem

Mengawali pembicaraan, seraya mengucapkan selamat datang kepada delegasi, Menlu Waled al-Moaelen menilai kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI ke Suriah amat penting bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Menlu menyatakan bahwa Indonesia memainkan posisi dan peran penting di OKI dan PBB terlebih dalam kapasitas Indonesia saat ini sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Menlu Suriah secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Menlu RI yang senantiasa mendukung perjuangan bangsa Arab, termasuk Suriah di forum PBB. Menlu Suriah mengungkapkan bahwa ketegangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda sebagai akibat tindakan permusuhan yang dilancarkan Israel sejak 1948 Timur tengah bahkan menjadi ajang konflik yang tak henti karena kekayaan cadangan cadangan minyak yang dimiliki. Konflik dan ketegangan di timur tengah semakin memanas karena kompetisi negara-negara Barat untuk menanamkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Barat bahkan kini mulai menaburkan benih sengketa dan perpecahan agama demi menguasai Timur tengah, namun Suriah menyakini dengan kekuatan akar budaya yang kuat dan kokoh, maka upaya-upaya tersebut tidak akan efektif.

Kepada Menlu Suriah, Ketua delegasi menyatakan sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah disampaikan Menlu. Kunjungan delegasi parlemen RI ke Suriah juga salah satunya untuk menunjukkan simpati rakyat Indonesia atas perjuangan rakyat Suriah. Ketua delegasi juga meyakinkan Menlu bahwa

kekuatan senjata dengan teknologi tinggi saja tidak akan mampu mengalahkan semangat perjuangan untuk membela tanah air.

Pada dialog selanjutnya anggota delegasi Komisi I DPR-RI juga menyampaikan pentingnya negara-negara Arab untuk bersatu sebagai salah satu kunci keberhasilan untuk menghadapi Israel dan dominasi Barat. Namun sangat disayangkan bahwa di luar Iran dan Suriah, negara-negara Arab belum menyuarakan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Pada hal negara-negara Arab memiliki potensi untuk menghadapi Israel di luar kemampuan persenjataan. Jika negara-negara tidak bersatu, maka dukungan yang diberikan oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia akan kurang efektif. Anggota delegasi lainnya Yuddy Chrisnandi juga menambahkan bahwa perjuangan rakyat Suriah sangat dekat di hati rakyat Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan Suriah dalam merebut kembali wilayah Golan yang masih diduduki Israel. Dia juga berharap, Suriah dapat memainkan peran pemersatu di dunia Arab.

f. Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI Ke Negara Golan Mesir, Yordania, Suriah Dan Lebanon Tanggal 28 Juni –4 Juli 2010.

Isu dataran tinggi Golan yang hingga kini masih diduduki Israel merupakan masalah pokok yang kini sedang dihadapi Suriah. Untuk melihat dari dekat dan kenyataan langsung dilapangan mengenai penderitaan yang dialami warga Suriah di wilayah Golan serta kebrutalan Israel diwilayah pendudukan delegasi Komisi I DPR-RI juga melakukan kunjungan lapangan ke kota Qunaitra (sekitar 40 km selatan Damaskus) di wilayah Golan. Dengan dipandu oleh Penanggung Jawab Pembangunan Wilayah Golan Madam Hamda Arkawi, para

delegasi memperoleh penjelasan rinci mengenai kesulitan dan tekanan kehidupan sosial ekonomi warga Suriah di wilayah pendudukan. Juga dijelaskan mengenai potensi ekonomi, ketersediaan sumber air, kekayaan alam dan letak geografis wilayah Golan yang amat strategis karena menghubungkan Suriah dengan Yordania sehingga Israel dengan berbagai cara dan strategi terus berupaya untuk menguasai wilayah tersebut.

Komisi I DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010 telah mengadakan kunjungan kerja luar negeri ke Negara Mesir, Yordania, Suriah dan Lebanon. Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni –4 Juli 2010 dengan jumlah Delegasi terdiri dari 20 (duapuluh) Anggota Komisi I DPR RI, 2 (dua) orang Staf Komisi I dan 2 (dua) orang Penghubung Kemlu dengan DPR RI. Dalam kunjungan tersebut, Delegasi juga mengikut sertakan 4 (empat) orang Wartawan/reporter dari TV One, ANTV dan MNC (RCTI). Dalam kunjungan tersebut, Delegasi memfokuskan kunjungan pada 2 (dua) aspek, yaitu : pelaksanaan diplomasi parlemen melalui pemberian dukungan terhadap perjuangan Bangsa Palestina dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Kantor Perwakilan RI di luar negeri sebagai salah satu mitra kerja Komisi I DPR RI³⁵.

g. Pertemuan dengan Jajaran Staf KBRI dan Masyarakat Indonesia di Suriah

Kesempatan baik kunjungan delegasi Komisi I DPR-RI ke Suriah juga dipergunakan untuk mengadakan tatap muka dan pertemuan ramah tamah dengan

³⁵DPR RI. Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI Ke Negara Mesir, Yordania, Suriah Dan Lebanon Tanggal 28 Juni –4 Juli 2010. http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1_kunjungan_KUNJUNGAN_DELEGASI_KOMISI_I_DPR_RI_KE_NEGARA_MESIR,_YORDANIA,_SURIAH_DAN_LEBANON.pdf. Diakses 10 Maret 2019.

komponen masyarakat Indonesia di Suriah yang sebagian besar terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Pada kesempatan tersebut, Ketua delegasi bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Arief Mudatsir mandan serta ketua BKSAP Abdillah Toha memakili delegasi menyampaikan sambutan dan penjelasan mengenai maksud tujuan kunjungan yang pada intinya merupakan pelaksanaan dari tugas-tugas DPR-RI khususnya pada Komisi I yang antar lain membidangi masalah pertahanan dan hubungan Luar negeri serta upaya untuk mempererat hubungan antar perlemen dan mendorong peningkatan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Dijelaskan pula mengenai situasi dan perkembangan di tanah air, termasuk upaya-upaya yang kini telah dan sedang dilakukan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja serta berbagai kendala yang perlu diatasi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pada acara dialog dan tanya jawab, para penanya umumnya mengajukan pertanyaan seputar sikap Malaysia terhadap Indonesia yang dinilai arogan dan tidak menghargai Indonesia, isu calon presiden RI, perkembangan masalah resolusi DK PBB 1747 mengenai nuklir Iran serta langkah pemerintah dalam meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Selain menjelaskan berbagai permasalahan tersebut, delegasi Komisi I DPR-RI juga menekankan kembali perlunya bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk menuntut ilmu dan menggali pengalaman di luar negeri secara sungguh-sungguh sehingga pada saatnya nanti dapat memberikan kontribusi nyata dan bermanfaat bagi negara dan bangsa. Pada masa mendatang diharapkan agar para mahasiswa Indonesia di

Timur Tengah tidak hanya mendalami ilmu-ilmu keagamaan tetapi juga bidang studi lainnya yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan di tanah air.

Selepas acara pertemuan dengan masyarakat Indonesia, delegasi Komisi I DPR-RRRI mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua Biro Politik Hamas, Mousa Abu Mazzrouk di damaskus. Pertemuan selain dalam rangka saling bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan perkembangan terkini masalah Palesitia, juga untuk menegaskan kembali dukungan Indonesia pada perjuangan rakyat Palestina. Pada kesempatan tersebut, anggota delegasi yang juga Ketua BKSAP Abdillah Toha menyampaikan bahwa kunjungan Presiden palestina mahmoud Abbas ke Indonesia baru-baru ini adalah daslam rangka meminta dukungan Indonesia untuk berpartisipasi pada Konferensi akan menghasilkan keputusan konkrit mengenai perdamaian. Disamping itu ditegaskan pula bahwa hendaknya Presiden mahmoud Abbas mengupayakan terlebih dahulu perdamaian dengan kelompok Hamas, dimana Indonesia bersedia menjadi mediator.

Menanggapi pernyataan delegasi parlemen Indonesia, Mousa Abu Mazrouk menyampaikan penghargaan atas sikap Indonesia dan umat Islam Indonesia atas dukungannya terhadap perjuangan Palestina, khususnya di forum PBB untuk menghentikan embargo di jalur Gaza. Dijelaskan pula bahwa gagasan Konferensi perdamaian yang disponsori AS bukan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran tetapi lebih ditujukan untuk konsumsi politik dalam negeri AS menghadapi Pemilu mendatang dengan target utama Iran.

Kunjungan kerja delegasi Komisi I DPR-RI ke Suriah memiliki arti penting, baik dalam kerangka peningkatan kerjasama antar pemerintah kedua negara di berbagai bidang. Makna kunjungan kali ini juga menjadi semakin penting dan berarti di tengah situasi dan dinamika politik di kawasan yang tidak menentu dan memanas. Di tengah upaya sejumlah negara Barat yang terus melakukan isolasi dan mengeliminasi peran Suriah, kunjungan delegasi Indonesia mampu merefleksikan kedekatan hubungan kedua negara yang telah terjalin erat tanpa kendala sejak awal masa kemerdekaan. Kunjungan ini juga memperlihatkan arti penting Indonesia bagi Suriah serta kemungkinan peranan Indonesia yang lebih aktif di kawasan.

Disadari bahwa intensitas dan bobot saling kunjungan antar parlemen kedua negara masih belum seimbang karena sejak tahun 2003, masih belum terlaksana kunjungan balasan parlemen Suriah ke Indonesia. Dengan kunjungan ini serta undangan yang disampaikan Ketua delegasi Komisi I DPR-RI kepada parlemen Suriah, diharapkan akan segera dapat terwujud kunjungan balasan dari pihak Suriah ke Indonesia.